



Dewan Pengupahan Minim Perhatian Pemerintah Daerah

PONTIANAK, SP - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Andreas Acui Simanjaya meyebut dewan pengupahan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) minim mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Padahal lembaga non-struktural yang bersifat tripartit tersebut memiliki tugas cukup berat. Terutama memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan sistem pengupahan. Andreas Acui Simanjaya

menyebutkan minimnya perhatian pemerintah daerah kepada dewan pengupahan tidak hanya terjadi di Kota Pontianak. Akan

tetapi kondisi serupa juga hampir merata terjadi pada seluruh kabupaten kota di

• Baca Halaman 11



ILUSTRASI

Hal 9 ■ dewan pengupahan

Provinsi Kalbar.

“Dukungan Pemda pada dewan pengupahan masing-masing daerah sangat kurang dan kita di Apindo setiap tahun menerima keluhan dari anggota yang di tugaskan di dewan pengupahan kabupaten kota,” ungkap Ketua Apindo Kalbar Andreas Acui Simanjaya kemarin.

Andreas mencontohkan seperti di Kota Pontianak, tunjangan kegiatan yang diberikan untuk dewan pengupahan tergolong minim. Lalu anggaran kegiatan untuk memperkaya wawasan dewan pengupahan Kota Pontianak juga tidak pernah terrealisasi. Ditambah

audiensi dengan Wali Kota Pontianak yang tidak pernah terlaksana.

Dirinya menjelaskan semua usulan dan keluhan dewan pengupahan tersebut padahal telah disampaikan kepada dinas terkait. Akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang sama yakni akan diperjuangkan tahun depan. Namun hasilnya setiap tahun anggaran dan fungsi dewan pengupahan semakin dikurangi.

“Tidak pernah kita rapat untuk membicarakan penerapan upah pekerja diatas satu tahun, kita hanya diundang rapat 1 atau 2 kali dalam satu tahun sebagai formalitas atau tukang

stempel untuk memutuskan UMK yang semua sudah di setting oleh Dinas,” katanya.

Dikatakannya refocusing anggaran selalu menjadi alasan dalam pengurangan anggaran dewan pengupahan Kota Pontianak. Pengurangan tersebut merupakan indikasi bahwa dewan pengupahan dianggap tidak penting terutama oleh dinas terkait. Lantaran pengurangan tersebut dilakukan oleh dinas terkait.

“Pengurangan anggaran itu bukan dari pihak Pemkot tetapi oleh dinas sendiri terhadap anggaran yang diperuntukkan Dewan Pengupahan Kota Pontianak,” tutupnya. **(din)**